



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LKjIP TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disajikan masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan selanjutnya. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Tahun 2022 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tenggarong, 22 Februari 2023

Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Plt.Kepala


Sy. Vanesa Vilna SIS, SE., MM
NIP. 19740217 199703 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis beserta program dan kegiatan. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, sehingga menjadi pijakan awal dalam mengawal pelaksanaan rencana strategis jangka menengah.

Ringkasan prestasi kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihasilkan di tahun 2022 berdasarkan dari Sasaran strategis (Indikator Kinerja Utama) perangkat daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah, dengan capaian indikator yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Skor penilaian penghargaan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar 2,07 dengan persentase capaian 94,09 dari target tahun 2022 sebesar 2,20. Namun di sisi lain walaupun skor tidak tercapai sesuai target, pada tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk Kategori Pemerintah Kabupaten dalam ajang Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian peringkat pertama tingkat provinsi Kalimantan Timur.
2. Rata-rata capaian indikator sasaran daerah tercapai 94,20 % dengan persentase realisasi capaian 100,21 melebihi target pada tahun 2022 sebesar 94,00%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja Bappeda dalam menyusun dan mengawal proses pelaksanaan pembangunan sudah baik.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan anggaran tahun 2022 menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan melalui proses perencanaan dan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dengan Pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang terintegrasi sehingga memudahkan dalam proses perencanaan sampai evaluasi dengan memperoleh prinsip efektif dan efisien.
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi perencanaan di Perangkat daerah, dalam merespon kemajuan ilmu pengetahuan, perundangan serta teknologi dan informasi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Tenggarong, Februari 2023

Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Plt.Kepala



Sy. Vanesa Vilna SIS, SE., MM
NIP. 19740217 199703 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Fungsi	2
1.2.1. Tugas.....	2
1.1.2. Fungsi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	5
1.4. Sarana Dan Prasarana	6
1.5. Aspek Strategis Organisasi	9
1.6. Isu Strategis.....	11
1.7. Sistematika Laporan	12
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan Strategis	13
2.2. Tujuan Dan Sasaran	13
2.2.1. Tujuan	14
2.2.2. Sasaran	15
2.3. Indikator Kinerja Utama	19
2.4. Rencana Kinerja Tahunan.....	20
2.5. Perjanjian Kinerja	28
2.5.1. Rencana Anggaran Tahun 2022	29
2.5.2. Alokasi Anggaran pendukung Sasaran Strategis.....	37
BAB III	38

AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun sebelumnya	38
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Sasaran Strategis	40
1. Skor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi	41
2. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Daerah	47
3.3. Analisis Capaian Perjanjian Kinerja Tambahan	52
3.4. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya	57
3.5. Realisasi Program, Kegiatan & Anggaran	59
BAB IV	71
PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Barang BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2022	6
Tabel 2. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara 2021-2026..	16
Tabel 3. Cascading Visi-Misi Kabupaten dengan Perencanaan Strategis Bappeda	18
Tabel 4. IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026.....	19
Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2022	20
Tabel 6. PK & Target Sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022	28
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2022.....	28
Tabel 8. Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2022	30
Tabel 9. Alokasi Anggaran per Sasaran.....	37
Tabel 10. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dan 2021	38
Tabel 11. Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara	39
Tabel 12. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	40
Tabel 13. Program dan Kegiatan Pendukung IKU 1	46
Tabel 14. Program dan Kegiatan Pendukung IKU 2	50
Tabel 15. Capaian Kinerja Tambahan.....	52
Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja	58
Tabel 17. Capaian efektifitas Kinerja.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	4
Gambar. 2. Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Gambar. 3. Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	10
Gambar. 4.Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	15
Gambar. 5.Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran RPJMD dan Renstra Bappeda	17
Gambar. 6. Inovasi & Pemanfaatan Aplikasi dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	42
Gambar. 7.Headline Kutai Kartanegara Raih Penghargaan Juara PPD Tingkat Prov.Kaltim	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam periodeisasi pelaksanaan perencanaan jangka menengah (5 Tahunan) bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan menjadi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Atas implementasi pelaksanaan Renstra-PD yang di operasionalkan melalui Renja-PD Tahun 2022, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian dari Akuntabilitas dan Transparansi atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2022. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Mendorong Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tugas dan Fungsi

1.2.1. Tugas

Sesuai Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah, dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.1.2. Fungsi

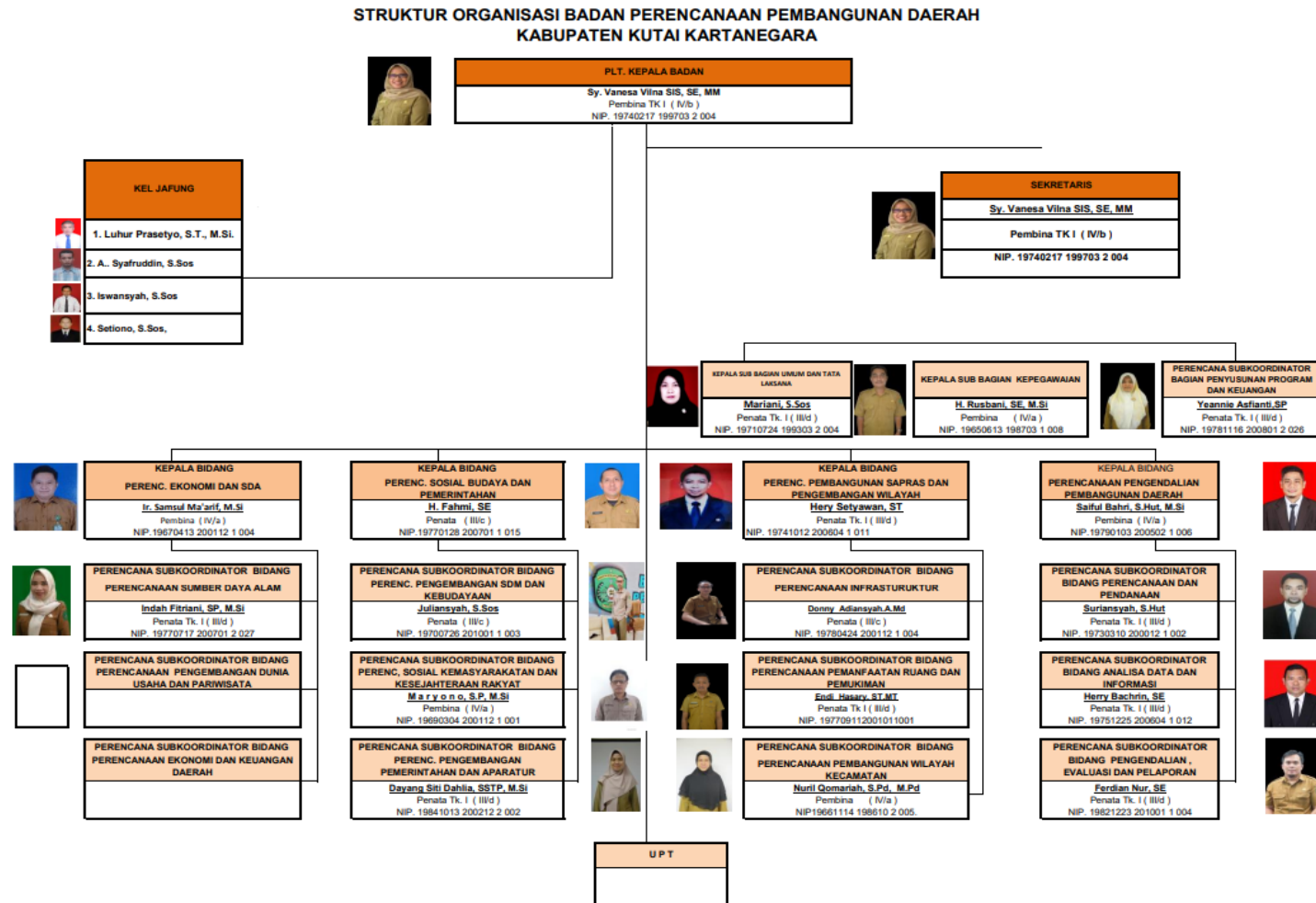
Dalam melaksanakan tugas tersebut BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah, membawahkan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah, membawahkan:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

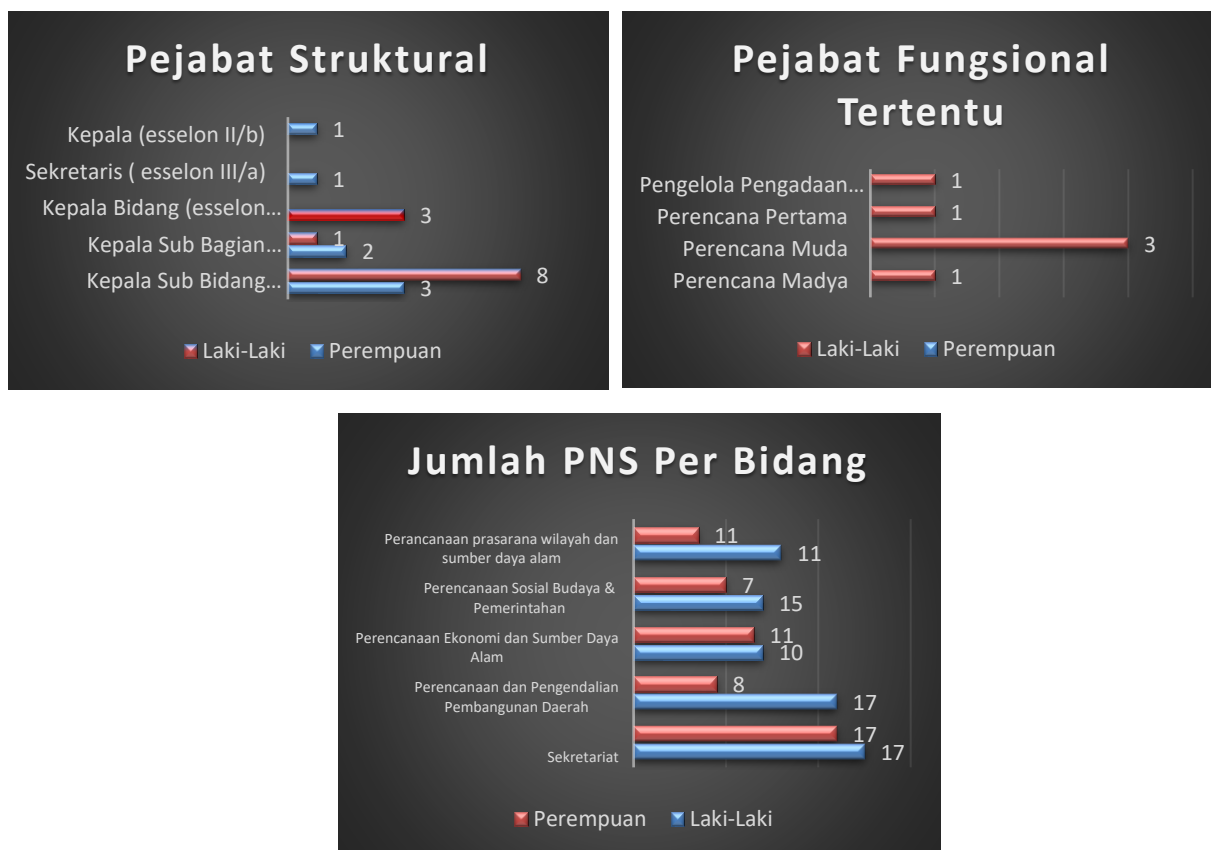


Gambar. 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara

1.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di BAPPEDA. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebanyak 124 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 16 Orang berstatus Tenaga Harian Lepas. Adapun komposisi mengenai Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah BAPPEDA disajikan pada gambar-gambar berikut ini.



Gambar. 2. Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin

1.4. Sarana Dan Prasarana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Barang BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

No	Nama Barang	Jumlah
A	PERALATAN DAN MESIN	
1.3.2.1	ALAT BESAR	
1.3.2.1.3	ALAT BANTU	
1.3.2.1.3.2	FEEDER	
	Elevator /Lift	2
B	ALAT ANGKUTAN	
1.3.2.2.1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
1.3.2.2.1.1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	
	Station Wagon	6
1.3.2.2.1.3	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	
	Pick Up	3
1.3.2.2.1.4	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	
	Sepeda Motor/Scooter	40
C	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1.3.2.3.3	ALAT UKUR	
1.3.2.3.3.1	ALAT UKUR UNIVERSAL	
	Global Positioning System	3
1.3.2.3.3.7	UNIVERSAL TESTER	
	Scanner (Universal Tester)	2
D	ALAT PENYIMPAN	
1.3.2.4.1.4.5		
	Lemari Penyimpan	1
E	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1.3.2.5.1	ALAT KANTOR	
1.3.2.5.1.2	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	
	Mesin Penghitung Uang	2
1.3.2.5.1.3	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	
	Mesin Fotocopy Folio	1
1.3.2.5.1.4	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	
	Lemari Besi/Metal	53
	Lemari Kayu	92
	Rak Besi	55
	Filing Cabinet Besi	20
	Brandkas	11
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	8
	Lemari Kaca	1

No	Nama Barang	Jumlah
1.3.2.5.1.5	ALAT KANTOR LAINNYA	
	CCTV - Camera Control Television System	1
	Papan Visual/Papan Nama	1
	White Board	8
	Alat Penghancur Kertas	16
	Mesin Absensi	4
	Alat Pengaman / Sinyal	20
	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	2
	Papan Nama Instansi	2
	Papan Tulis	2
F	1.3.2.5.2 ALAT RUMAH TANGGA	
	1.3.2.5.2.1 MEUBELAIR	
	Meja Kerja Kayu	1
	Kursi Besi/Metal	3
	Kursi Kayu	55
	Meja Rapat	39
	Meja Resepsionis	3
	Meja Komputer	13
	Partisi	2
	1.3.2.5.2.2 ALAT PENGUKUR WAKTU	
	Jam Elektronik	30
	1.3.2.5.2.3 ALAT PEMBERSIH	
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1
	Alat Pembersih lainnya	35
	1.3.2.5.2.4 ALAT PENDINGIN	
	Lemari Es	7
	A.C. Window	29
	A.C. Split	23
	Kipas Angin	6
	1.3.2.5.2.7 ALAT PEMADAM KEBAKARAN	
	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	16
G	1.3.2.5.3 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	
	1.3.2.5.3.1 MEJA KERJA PEJABAT	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	18
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	292
	Meja Kerja Pejabat lain-lain	10
	1.3.2.5.3.2 MEJA RAPAT PEJABAT	
	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2
	Meja Tamu Biasa	1
	Meja Maket/Peta	1
	Meja Operator	1
	1.3.2.5.3.3 KURSI KERJA PEJABAT	

No		Nama Barang	Jumlah
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
		Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	532
		Kursi Kerja Pejabat lainnya	9
	1.3.2.5.3.5	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	
		Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	94
		Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	96
	1.3.2.5.3.7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	
		Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	20
		Buffet Kaca	1
H	1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
	1.3.2.6.1	ALAT STUDIO	
	1.3.2.6.1.2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	
		Camera Electronic	32
		Video Monitor	3
		Video Processor	1
		Camera Film	3
		Lensa Kamera	2
		Layar Film/Projector	50
		Video Conference	2
		Alat Studio Video Lainnya	35
	1.3.2.6.1.5	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	
		Kompas Geologi	2
		Alat Studio Pemetaan lainnya	10
I	1.3.2.6.2	ALAT KOMUNIKASI	
	1.3.2.6.2.1	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	
		Telephone (PABX)	1
		Facsimile	2
J	1.3.2.10	KOMPUTER	
	1.3.2.10.1	KOMPUTER UNIT	
	1.3.2.10.1.1	KOMPUTER JARINGAN	
		Komputer Jaringan lainnya	3
	1.3.2.10.1.2	PERSONAL KOMPUTER	
		P.C Unit	213
		Lap Top	10
		Note Book	88
		Tablet PC	1
K	1.3.2.10.2	PERALATAN KOMPUTER	
	1.3.2.10.2.1	PERALATAN MAINFRAME	
		Hard Disk	16
		peralatan mainframe lainnya (dst)	3

No	Nama Barang	Jumlah
1.3.2.10.2.3	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	
	Monitor	27
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	186
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	13
	External	15
	Peralatan Personal Komputer lainnya	84
1.3.2.10.2.4	PERALATAN JARINGAN	
	Server	2
	Hub	1
	Peralatan Jaringan lainnya	51
L 1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1.3.2.14.1	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1.3.2.14.1.3	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	
	alat bantu ekplorasi lainnya lainnya (dst)	2
M 1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	
1.3.2.19.1	PERALATAN OLAH RAGA	
1.3.2.19.1.6	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	
	Peralatan Olahraga lainnya (dst)	2

Sumber: Bagian Umum dan Ketatalaksanaan BAPPEDA, 2022

1.5. Aspek Strategis Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan serta memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Visi dari Pembangunan Lima Tahunan (2021-2026) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Adapun penjabaran terhadap Visi diatas adalah sebagai berikut :

SEJAHTERA: Merupakan Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

BERBAHAGIA: Merupakan Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun Misi Pembangunan Lima Tahunan (2021-2026) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:



Gambar. 3. Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, secara umum Bappeda memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappeda mendukung pencapaian Misi pertama, yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”. Dalam mewujudkan Misi 1 tersebut, diturunkan dalam tujuan pembangunan (Tujuan 1 RPJMD), yaitu meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dengan indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**”.

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut terdapat 3 sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP kabupaten.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks persepsi dengan indikator sasaran Indeks kualitas pelayanan publik.

Atas ketiga sasaran tersebut maka Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung sasaran 1 yaitu meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.6. Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di masa datang. Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, yaitu:

1. Kualitas sumber daya perencana yang menguasai IT
2. Kesiapan dokumen perencanaan Pemindahan IKN di Prov. Kalimantan Timur.
3. Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
4. Responsif terhadap Perubahan Regulasi Pembangunan daerah.
5. Responsif terhadap pengembangan wilayah

6. Tuntutan integrasi perencanaan pembangunan daerah dari level nasional Provinsi Kabupaten Desa.
7. Penyesuaian pembangunan berbasis new normal

1.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas kondisi umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
Bab II	Perencanaan Kinerja	Menjelaskan secara ringkas dokumen ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan umum atas Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah, yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2026 dan diturunkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Perumusan atas Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas kemudian ditindak lanjuti guna dikembangkan secara lebih spesifik ke dalam tujuan dan sasaran agar dapat lebih mengarahkan arah kerja sebagai panduan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

2.2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang dalam tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

2.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Sesuai dengan Misi ke-1 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021-2026 yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani” yang kemudian diturunkan dalam Tujuan meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dengan 3 sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP kabupaten.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran Indeks Persepsi Anti Korupsi.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks persepsi kualitas pelayanan publik.

Maka pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang mendukung pencapaian sasaran ke-1 RPJMD dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja Rata-rata capaian indikator tujuan daerah.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD maka dilakukan perumusan perencanaan terintegrasi yang tergambar dalam logical framework sebagai berikut :



Gambar. 4. Keterkaitan Tujuan Bappeda dengan Tujuan dan Sasaran Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

2.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah”

Dengan indikator sasaran :

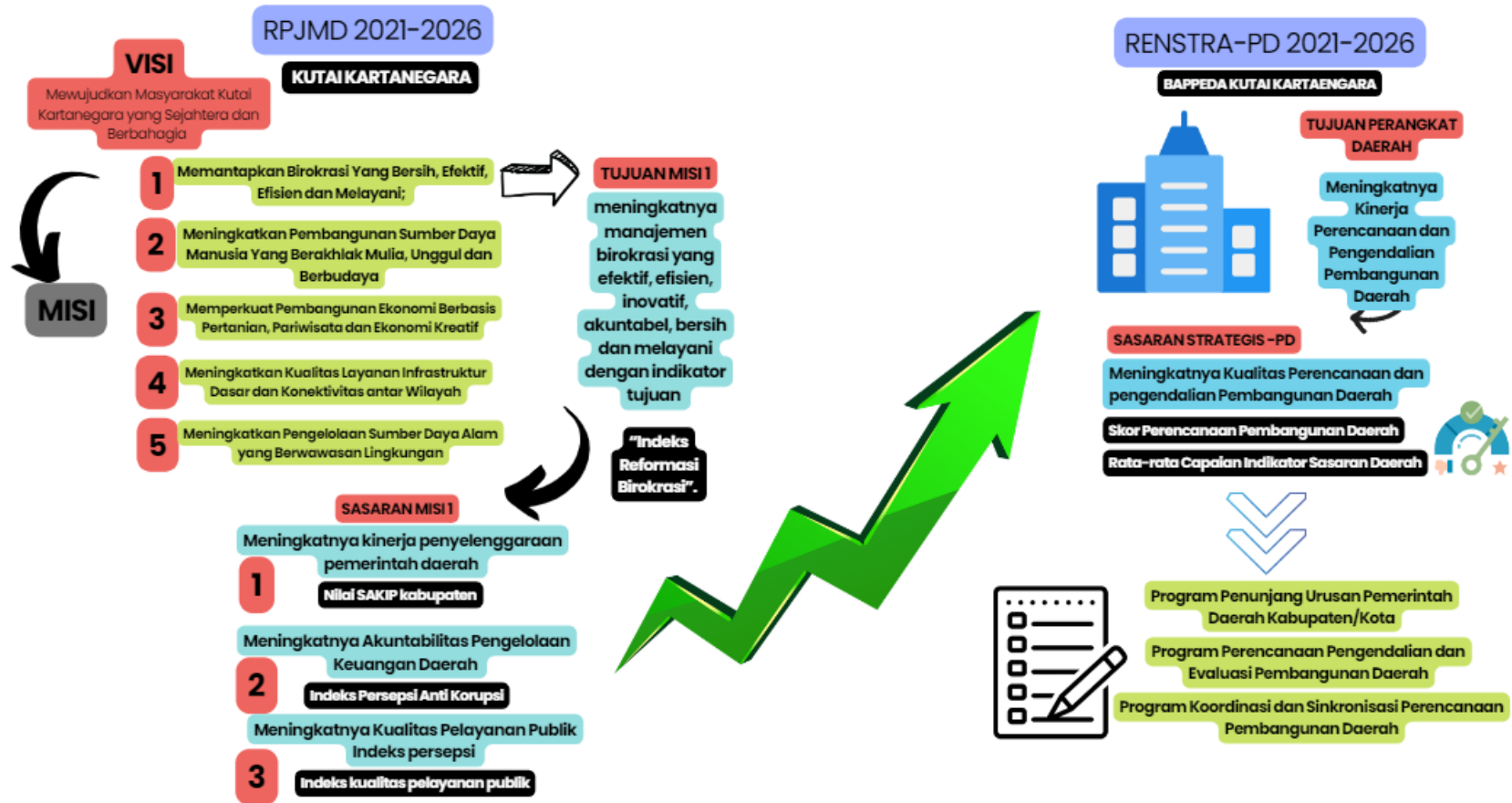
1. Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Rata-rata capaian Indikator Sasaran Daerah

Tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kab. Kutai Kartanegara 2021-2026

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata Capaian Indikator tujuan Daerah	75	85	87	90	93	Indikator Tujuan
	1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,20(1)	2,30 (1)	2,40 (1)	2,50 (1)	2,60 (1)	Indikator Kinerja Utama
		Rata-rata capaian Indikator Sasaran Daerah	94,00	95,00	96,00	96,50	97,00	Indikator Kinerja Utama

Dalam sasaran terdapat Indikator terukur yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai indikator yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Keterkaitan secara linieritas Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar. 5.Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran RPJMD dan Renstra Bappeda

Untuk mencapai target pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. Cascading Visi-Misi Kabupaten dengan Perencanaan Strategis Bappeda

RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026				
VISI	MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA			
MISI	MEMANTAPKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MELAYANI			
TUJUAN	MANAJEMEN BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFISIEN, INOVATIF, AKUNTABEL, BERSIH DAN MELAYANI : INDIKATOR (INDEKS-RB)			
SASARAN	MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH : INDIKATOR (NILAI SAKIP KABUPATEN)			
RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah INDIKATOR: Rata-rata capaian indikator tujuan daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	1. Skor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi.	Penguatan kualitas perencanaan yang konsisten, komprehensif, serta terukur berbasis pengendalian dan evaluasi	Integrasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah secara sinergi dalam pendekatan holistic-integratif
				Pengembangan basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan kewilayahan
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah
				Penguatan pengendalian dan evaluasi sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan daerah
		2. Rata-rata capaian indikator daerah	Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan	Penguatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dimasing-masing perangkat daerah secara periodik dan berkelanjutan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Penyediaan dokumen perencanaan pendukung pencapaian program dedikasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Penguatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dimasing-masing perangkat daerah secara periodik dan berkelanjutan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Penyediaan dokumen perencanaan pendukung pencapaian program dedikasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Penguatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dimasing-masing perangkat daerah secara periodik dan berkelanjutan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				Penyediaan dokumen perencanaan pendukung pencapaian program dedikasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



2.3. Indikator Kinerja Utama

Setiap Sasaran Strategis Perangkat Daerah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Berdasarkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Berikut disajikan IKU Bappeda Tahun 2021-2026:

Tabel 4.IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KETERANGAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Rata-rata Capaian Indikator tujuan Daerah	75	85	87	90	93	Indikator Tujuan
	1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,20 (1)	2,30 (1)	2,40 (1)	2,50 (1)	2,60 (1)	Indikator Kinerja Utama
		Rata-rata capaian Indikator Sasaran Daerah	94,00	95,00	96,00	96,50	97,00	Indikator Kinerja Utama

2.4. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran/operasionalisasi dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, dan akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Adapun Program Kegiatan dan sub kegiatan yang telah sesuai dengan nomenklatur baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 090 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Kinerja Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai LKjIP	Nilai/Peringkat		87 (A)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen		12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	5
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	4
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	2
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen	Tenggarong	1
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	dokumen		5
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	Bulan	Tenggarong	12
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	5
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	Tenggarong	1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	dokumen		3
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD (Masa Ekonomis)	dokumen	Tenggarong	1

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Kinerja Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian
1	2	3	4	5	6
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi BMD	dokumen	Tenggarong	1
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen BMD Perangkat Daerah	dokumen	Tenggarong	1
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	2
	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen		1
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	Stel	Tenggarong	145
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Kepegawaian (DUK,KGB,Kenaikan Pangkat,Pensiun)	dokumen	Tenggarong	4
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	1
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN	ASN	Tenggarong	16
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN	ASN	Tenggarong	50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan		9
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan jaringan instalasi listrik	Jenis	Tenggarong	2
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	Jenis	Tenggarong	48
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	Jenis	Tenggarong	9
		Jumlah kotak makanan dan minuman rapat yang disediakan	Kotak	Tenggarong	3.35
		Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan	Kotak	Tenggarong	2.09
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan	Eksemplar	Tenggarong	1.013
		Jumlah Cetakan Kalender	Buah	Tenggarong	174
		Jumlah penggandaan	Lembar	Tenggarong	50.13
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan	Eksemplar	Tenggarong	2.493

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Kinerja Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kontrak advetorial	Advetorial	Tenggarong	2
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	Jenis	Tenggarong	15
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Orang/Kali	Tenggarong	150
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)	Berkas	Tenggarong	65
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi	Aplikasi	Tenggarong	3
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		100
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	Jenis	Tenggarong	2
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	Tenggarong	18
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	Tenggarong	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan		12
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Tenggarong	12
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	Bulan	Tenggarong	12
		Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	Tenggarong	12
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	%		100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	Tenggarong	15
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	Tenggarong	6

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Kinerja Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian
1	2	3	4	5	6
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	Tenggarong	25
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	Tenggarong	3
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang dipelihara kantor	Jenis	Tenggarong	3
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan pemeliharaan gedung kantor	Kali	Tenggarong	36
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kali	Tenggarong	132
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	%		100
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen	dokumen		22
		Jumlah OPD	OPD		58
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali		2
		Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum		3
		Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali		2
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	1 dokumen
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	dokumen	Tenggarong	1 dokumen
		Jumlah Pendampingan Perencanaan	OPD	Tenggarong	58
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik	even	Tenggarong	1

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Kinerja Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian
1	2	3	4	5	6
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	even	Tenggarong	3
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang	even	Tenggarong	2
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	18
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RKPD dan Perubahan RKPD)	dokumen	Tenggarong	2
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	dokumen		4
		Jumlah pendampingan ketersediaan data	urusan		32
		Jumlah Pusat layanan data dan informasi	Pusat layanan data dan informasi		1
		Jumlah Regulasi Daerah	Regulasi		1
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang		30
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data Kemiskinan	dokumen	Tenggarong	1
		Jumlah dokumen (data bidang perencanaan)	dokumen	Tenggarong	3
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pendampingan ketersediaan data (32 urusan)	urusan	Tenggarong	32
		Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	Tenggarong	30
		Jumlah Pusat Layanan Data dan Informasi	Pusat Data	Tenggarong	1
		Jumlah Regulasi Daerah	Regulasi	Tenggarong	1
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	1
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen		13

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Kinerja Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian	Dokumen	Tenggarong	8
2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen pengendalian	Dokumen	Tenggarong	1
3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Dokumen	Tenggarong	4
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	%		100
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	%		100
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	%		100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen		27
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	13
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	13
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	Tenggarong	1
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	13
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	1

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Kinerja Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian
1	2	3	4	5	6
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	12
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	12
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	Tenggarong	1
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	12
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	1
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen		13
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	6
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	6
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	Tenggarong	1
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	6
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	1
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	5
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	dokumen	Tenggarong	5
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	Tenggarong	1
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	dokumen	Tenggarong	5

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Kinerja Tahun 2022	
				Lokasi	Target capaian
1	2	3	4	5	6
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen	dokumen	Tenggarong	1
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen		25
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	5
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	5
		Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	dokumen	Tenggarong	1
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	5
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	1
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	18
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	18
		Jumlah Mou dengan perguruan tinggi	dokumen	Tenggarong	1
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	18
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen	dokumen	Tenggarong	1

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan dokumen rencana strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, amanat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. PK & Target Sasaran Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	Target
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	2,20 (1)
		Rata-rata capaian Indikator Sasaran Daerah	Persen	94,00

Selain perjanjian kinerja yang berdasarkan dari dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat perjanjian kinerja tambahan yang merupakan amanat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
2	Meningkatnya Pemenuhan ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
3	Membuat Inovasi dan /atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
4	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

2.5.1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan pada Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, maka operasionalisasi atau pelaksanaan kinerja tahunan di tuangkan dalam Rencana kerja Tahun 2022 dan Dokumen pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka renja tahun 2022 sudah mengacu pada kepmen tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan anggaran murni sebesar **Rp. 30.739.332.331**, melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2022 menjadi **Rp. 34.143.723.515**

Tabel 8. Program Kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran (APBD) Tahun 2022

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	KINERJA			ANGGARAN	
		Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Tenggarong	Nilai Sakip Perangkat Daerah			23,913,928,857	25,980,459,212
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			454,481,033	445,233,763
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	200,000,000	314,282,730
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	20,000,000	24,200,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	150,000,000	22,270,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	84,481,033	84,481,033
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			16,663,633,869	16,570,844,224
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	1668	orang/bulan	16,423,360,069	16,339,890,424
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	Laporan	220,273,800	220,273,800
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	20,000,000	10,680,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			120,000,000	131,318,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Penatausahaan	3	Dokumen	120,000,000	131,318,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			563,260,000	655,560,000
	Tenggarong	Jumlah Pakaian				
	Tenggarong	Jumlah ASN				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	147	Stell	177,260,000	239,560,000

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	KINERJA			ANGGARAN	
		Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tenggarong	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	50,000,000	50,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	ASN	336,000,000	366,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,697,296,000	1,859,683,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15	Jenis	200,000,000	219,126,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Bahan Logistik	7	Jenis	449,902,000	459,558,000
	Tenggarong	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	5381	Kotak		
	Tenggarong	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang disediakan	7	Jenis		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Cetak	1061	eksemplar	65,646,000	55,646,000
	Tenggarong	Jumlah penggandaan	175	buah		
	Tenggarong	Jumlah Cetak Kalender	20062	Lembar		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tenggarong	Jumlah bacaan yang disediakan	9	Exemplar	202,409,000	322,409,000
	Tenggarong	Jumlah Kontrak Advetorial	25	Kali		
Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	14	Jenis	49,259,000	129,264,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	146	orang	500,000,000	490,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) dan Arsip pada unit kearsipan (UK)	65	berkas	80,010,000	80,010,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1	Aplikasi	150,070,000	103,670,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tenggarong	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah			432,578,036	1,591,263,036
Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Mebeleur yang diadakan	27	unit	-	200,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah peralatan gedung kantor	18	unit	432,578,036	1,391,263,036
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			2,137,734,698	2,324,251,968
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	1,405,023,920	1,595,023,920
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	732,710,778	729,228,048

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	KINERJA			ANGGARAN	
		Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Tenggarong	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	bulan		
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tenggarong	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah			1,844,945,221	2,402,305,221
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	4	unit	313,830,000	313,830,000
	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6	unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	25	unit	222,300,000	209,660,000
	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	3	unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	38	kali	646,044,721	1,086,044,721
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	132	kali	662,770,500	792,770,500
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah			4,117,400,000	4,817,400,000
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1,780,000,000	2,480,000,000
	Tenggarong	Jumlah Pendampingan perencanaan				
	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik				
	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				
	Tenggarong	Jumlah pelaksanaan Musrenbang				
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	Dokumen	300,000,000	300,000,000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Pendampingan perencanaan	58	OPD	355,000,000	1,055,000,000
	Tenggarong	Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	1	Dokumen		
	Tenggarong	Jumlah dokumen penyusunan strategi kukar sebagai daerah mitra IKN	1	Dokumen		
	Tenggarong	Jumlah dokumen proses bisnis RPJMD	1	Dokumen		

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	KINERJA			ANGGARAN	
		Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	1	Kali	90,000,000	90,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Tenggarong	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	Forum	45,000,000	33,620,000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	1	Kali	90,000,000	57,599,000
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	18	Dokumen	200,000,000	73,309,000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD)	4	Dokumen	700,000,000	870,472,000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah			1,434,900,000	1,034,900,000
	Tenggarong	Jumlah pendampingan ketersediaan data				
	Tenggarong	Jumlah layanan data dan informasi kecamatan				
	Tenggarong	Jumlah Rancangan Regulasi Daerah				
	Tenggarong	Jumlah Personil Pembinaan Data				
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen (Data Bidang Perencanaan)	1	Dokumen	802,500,000	402,500,000
	Tenggarong	Jumlah Dokumen analisis data Kemiskinan	3	Dokumen		
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tenggarong	Jumlah Pendampingan ketersediaan data (32 Urusan)	32	Urusan	530,000,000	530,000,000
	Tenggarong	Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	1	Layanan data dan informasi		
	Tenggarong	Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	1	Rancangan Regulasi		
	Tenggarong	Jumlah Personil Pembinaan Data	30	orang		
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah dokumen Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	102,400,000	102,400,000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			902,500,000	1,302,500,000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	10	Dokumen	202,500,000	602,500,000

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	KINERJA			ANGGARAN	
		Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tenggarong	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	Dokumen	700,000,000	700,000,000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD			2,945,249,440	3,820,249,440
	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD				
	Tenggarong	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD				
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1,185,250,000	1,360,250,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	Dokumen	115,000,000	115,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	Dokumen	100,000,000	100,000,000
	Tenggarong	Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	Dokumen		-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	Dokumen	70,000,000	70,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	Dokumen	198,500,000	198,500,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	Dokumen	236,750,000	236,750,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	Dokumen	100,000,000	100,000,000
	Tenggarong	Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	Dokumen		-

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	KINERJA			ANGGARAN	
		Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	Dokumen	115,000,000	115,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	Dokumen	250,000,000	425,000,000
	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pendukung Kebijakan Kemiskinan	2	Dokumen		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			880,000,000	1,180,000,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	Dokumen	67,500,000	67,500,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	Dokumen	100,000,000	100,000,000
	Tenggarong	Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	Dokumen		-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	Dokumen	200,000,000	200,000,000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	Dokumen	33,750,000	33,750,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	Dokumen	90,000,000	90,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	Dokumen	100,000,000	100,000,000
	Tenggarong	Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	Dokumen		-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	Dokumen	255,000,000	255,000,000

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	KINERJA			ANGGARAN	
		Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2	Dokumen	33,750,000	333,750,000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			879,999,440	1,279,999,440
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	45,000,000	45,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Dokumen	100,000,000	11,182,000
	Tenggarong	Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	Dokumen		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Dokumen	249,999,620	235,749,620
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3	Dokumen	45,000,000	248,068,000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18	Dokumen	45,000,000	45,000,000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	Dokumen	100,000,000	100,000,000
	Tenggarong	Jumlah MoU dengan Perguruan Tinggi	1	Dokumen		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	Dokumen	249,999,820	249,999,820
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2	Dokumen	45,000,000	345,000,000
Jumlah					30,976,578,297	34,618,108,652

2.5.2. Alokasi Anggaran pendukung Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 9.Alokasi Anggaran per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Anggaran	% dari Total Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	4,817,400,000	13.92	
		Rata-rata capaian Indikator Sasaran Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	3,820,249,440	11.04	
				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD			
				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD			
			ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	25,980,459,212	75.05	
			TOTAL ANGGARAN TAHUN 2022		34,618,108,652	100	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yang merupakan periode akhir, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 10. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 dan 2021

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27,88	30,00	Meningkat
2.	Pengukuran Kinerja	25%	20,63	25,00	Meningkat
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13,56	15,00	Meningkat
4.	Evaluasi Kinerja	10%	8,77	9,13	Meningkat
5.	Capaian Kinerja	20%	14,38	14,50	Meningkat
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	85,21	93,63	Meningkat
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	AA	Meningkat
	Interpretasi		Memuaskan	Sangat Memuaskan	

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai 93,63 dengan kategori AA dan dapat diinterpretasikan Sangat Memuaskan. Capaian nilai 93,63 hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pemerolehan nilai evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang memperoleh nilai 85,22.

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas mengindikasikan adanya upaya perbaikan dan/atau tindakan korektif secara signifikan, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal/mandiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi walaupun secara umum hasil penilaian kinerja pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat, di sisi lain masih terdapat permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi dan perlu menjadi perhatian serta perbaikan di masa mendatang yaitu :

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Bappeda kabupaten Kutai Kartanegara dari semua komponen penilaian mengalami peningkatan dari tahun 2020. Berdasarkan hasil tersebut inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan rekomendasi/ tindak lanjut atas laporan evaluasi implementasi Sistem AKIP di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Tabel 11. Tindak Lanjut atas LHE Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memuat perbandingan capaian kinerja (output) dengan tahun sebelumnya pada laporan Kinerja (output).	Penyusunan Laporan Kinerja (Output) agar menyajikan perbandingan capaian kinerja (output) dengan tahun sebelumnya	Penyajian Laporan yang lebih komprehensif, sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan kinerja berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku	1. Penyiapan Format Kertas Kerja Laporan yang menyajikan capaian kinerja beserta perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya
				2. Mengintensifkan dialog kinerja dan evaluasi melalui Rapat Evaluasi atas capaian kinerja triwulanan
				3. Pemanfaatan Manajemen Resiko melalui rencana Aksi dan Rencana Tindak Pengendalian
2	Informasi mengenai kinerja dalam laporan kinerja (output) belum dapat diandalkan	penyusunan Laporan Kinerja (Output) agar menyajikan data kinerja yang dapat diandalkan, berdasarkan kriteria : sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan Dapat ditelusuri sumber datanya, terverifikasi dan Mutakhir (Up to date)	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja berbasis Web Aplikasi (e-Pantau) dan aplikasi pendukung ketersediaan Data Makro Daerah dan Sektoral (Becik)	1. Komitmen pengisian capaian kinerja berbasis e-pantau (disertai bukti dukung /evidence) atas pelaksanaan kinerja
				2. Rapat rutin evaluasi kinerja per bulan untuk membangun Komunikasi antar bidang terkait pencapaian kinerja tahun berjalan, faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan Sasaran Strategis

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 target pencapaian kinerja organisasi di ukur melalui 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu (1) Skor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi dan (2) Rata-rata capaian indikator sasaran daerah yang menjadi gambaran kinerja dari Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Realisasi capaian kinerja organisasi berdasarkan Indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Data Capaian Tahun Perencanaan 2021	TAHUN 2022			Kriteria Penilaian Capaian	% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2022	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (2026)
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Skor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi	2.11	2,20 (1)	2.07	94.09	Sangat Tinggi	(0.04)	2.60	79.62
		Rata-rata capaian indikator sasaran daerah.	n.a	94.00	94.20	100.21	Sangat Tinggi	-	97.00	97.11

Analisis atas pencapaian Sasaran Strategis yang di ukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Skor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Skala Regional/Provinsi

Dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan (think-tank), dan administrator perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Skor Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) dalam Skala Regional/Provinsi. Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) sendiri bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dalam mendorong penyusunan dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan serta mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah serta mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.



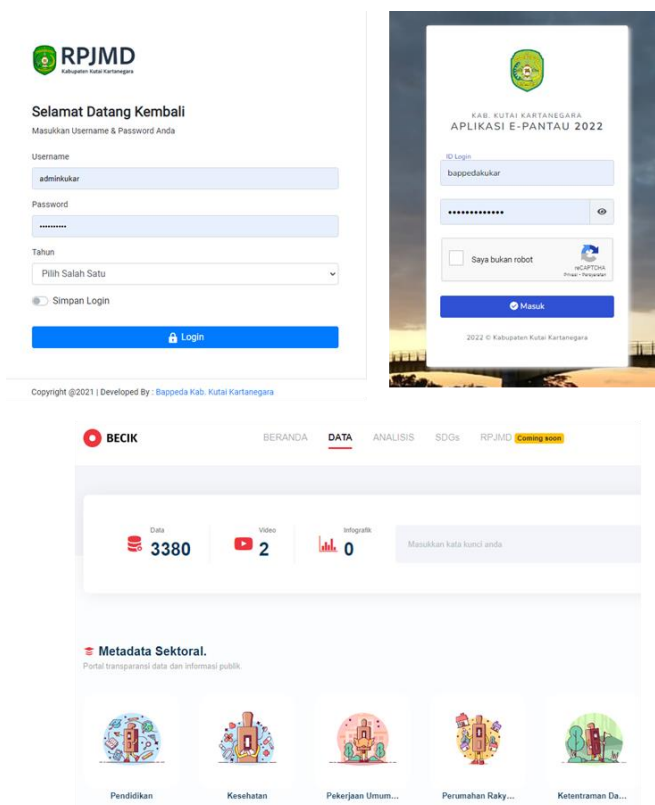
Target		Realisasi 2022	% Capaian	
2022	2026 (Akhir Renstra)		2022	2026 (Akhir Renstra)
2.20 (Peringkat 1)	2.60 (Peringkat 1)	2.07 (Peringkat 1)	94,09	79,62

Implementasi dalam rangka pencapaian dari target tersebut diatas di wujudkan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara melalui beberapa hal berikut:

1. Pencapaian indikator Makro daerah yang mulai membaik pasca Pandemi Covid 19, yang menggambarkan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah disusun secara komprehensif serta memuat strategi khusus dalam penanganan dan pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid 19.
2. Menyiapkan dokumen RKPD dengan kualitas yang baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan dengan mengajak dan men “direct” seluruh OPD untuk merubah

mindset perencanaan agar menjadi lebih baik, yang berbasis pada money follow result dengan tidak bekerja secara business as usual yang minim inovasi, tetapi harus memiliki sense of crisis melalui perencanaan yang baik.

3. Menciptakan dan mengembangkan inovasi yang mendukung dalam bidang perencanaan di daerah, seperti pemanfaatan web aplikasi e- RPJMD sebagai aplikasi pendamping dalam rangka pemanfaatan SIPD, web aplikasi Becik yang merupakan aplikasi Satu Data Kutai Kartanegara yang juga berfungsi sebagai aplikasi penyedia data input perencanaan pembangunan daerah dan Aplikasi e-Pantau yang merupakan aplikasi yang membantu untuk memudahkan dalam rangka proses pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
4. Assistensi dokumen perencanaan perangkat daerah dalam rangka pencapaian target makro daerah, pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



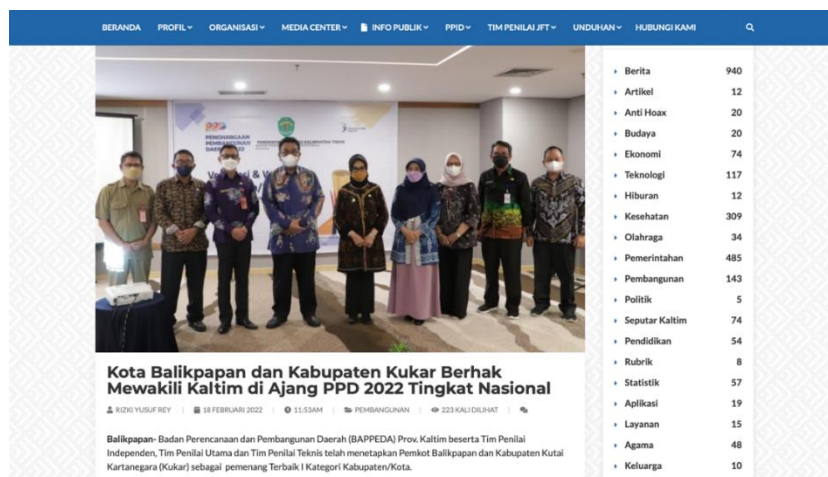
Gambar. 6. Inovasi & Pemanfaatan Aplikasi dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

Sukses pencapaian sasaran strategis ini tergambar dengan di raihnya anugerah perencanaan pembangunan daerah (PPD) **dimana 3 tahun berturut-turut (Hattrick) sejak tahun 2019,2020 dan 2021** Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh peringkat pertama untuk Kategori Kabupaten dalam penerima Penghargaan Perencanaan Pembangunan daerah dan selama 3 tahun berturut tersebut pula, Kabupaten Kutai Kartanegara mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk kompetisi yang sama di tingkat Nasional untuk Kategori Kabupaten.



Gambar 1. Perbandingan Capaian Kinerja IKU-2

Capaian ini merupakan bentuk komitmen dan perbaikan yang terus dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan perbaikan-perbaikan yang berpangkal pada meningkatnya capaian kinerja.



Gambar. 7.Headline Kutai Kartanegara Raih Penghargaan Juara PPD Tingkat Prov.Kaltim

Sumber: <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/>

Adapun faktor ataupun kunci kesuksesan dalam mencapai target kinerja dari Indikator Kinerja Utama diatas adalah sebagai berikut:



1. Manajemen Perencanaan

Manajemen perencanaan Pembangunan baik dari tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Dalam hal perencanaan, di dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan sudah sejalan, dimana sudah sesuai dengan visi dan misi serta kebijakan yang tertuang dalam RPJMD. Konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada dokumen perencanaan tahunan sudah dapat dipetakan dengan baik. Serta dalam perencanaan selalu dilakukan penyelarasan dengan prioritas Nasional dengan tersedianya dukungan program prioritas daerah terhadap kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat serta berhasil mewujudkan kebijakan pembangunan daerah RKPD yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Begitu pula pada posisi pengendalian dan evaluasi, dengan menggunakan aplikasi e-pantau proses pengendalian dan evaluasi bisa dilaksanakan dengan lebih optimal, sehingga proses perencanaan sampai evaluasi dapat berjalan dengan sinergis.

2. Kolaborasi stakeholder Pembangunan

Keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan suatu daerah merupakan faktor pendukung semakin meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah. Model kolaborasi pembangunan yang melibatkan pihak akademisi, bisnis, perbankan, komunitas, pemerintah dan media, selaras dengan paradigma perencanaan

pembangunan, yakni mengombinasikan prinsip kebijakan top-down, bottom-up, dan teknokratik. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai leading sector dalam perencanaan pembangunan menginisiasi adanya forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sebagai bagian dari inovasi yang mewadahi kewajiban moral dunia usaha untuk berperan dalam pembangunan melalui skema dan tata kelola yang terarah dan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Melalui forum TJSP pembiayaan pembangunan daerah tidak hanya dibiayai APBD tetapi juga melalui pembiayaan dari TJSP. Hal ini memberikan alternatif perencanaan dan pembiayaan pembangunan yang lebih fokus terarah dan berkualitas.

3. Inovasi

Inovasi pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan handal (Good Governance). Dalam hal ini inovasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi ini memudahkan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan, selain itu dalam rangka penerapan prinsip Good Governance tadi dengan adanya inovasi maka proses perencanaan dan pembangunan menjadi lebih Transparan dan Akuntabel, Responsif serta efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyiapkan beberapa inovasi yang berkaitan dengan teknologi sebagai tool untuk membantu dalam proses perencanaan dengan membangun beberapa web aplikasi seperti Becik, e-Pantau dan e-RPJMD, serta inovasi perencanaan penanggulangan kemiskinan berbasis aplikasi yaitu Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK), Keberadaan aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan kolaborasi pemerintah daerah dengan dunia usaha dan percepatan penanganan kemiskinan di Kutai Kartanegara.

Adapun faktor penghambat pencapaian target Indikator sasaran strategis ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Basis Data

Dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan yang berorientasi pada pembangunan di wilayahnya tentunya diperlukan data-data yang up to date, valid dan terukur yang dijadikan sebagai indikator pembangunan. Permasalahan yang terjadi selama ini bahwa penggunaan data yang update dan valid dalam rangka proses pembangunan masih

sangat terbatas, selain itu koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada perangkat Daerah masih kurang, sehingga data-data yang seharusnya saling berhubungan menjadi terpisah dan sulit untuk diakses serta masih lemahnya pemahaman dan komitmen dari perangkat daerah akan pentingnya data.

2. Penguatan Proses Perencanaan

Pemahaman OPD terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan yang masih rendah ditambah dengan terbitnya peraturan-peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah, cukup memberikan dampak dalam proses perbaikan perencanaan di daerah. Proses asistensi dan pemahaman ulang terkait peraturan-peraturan tersebut tentunya memakan proses dan waktu. Selain itu Perangkat Daerah masih lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan yang bersifat administratif daripada pekerjaan yang bersifat substansial seperti proses penyusunan perencanaan.

Dalam rangka mengatasi faktor penghambat yang akan mempengaruhi capaian kinerja tersebut maka diperlukan Alternatif/Solusi pemecahan masalah sebagai tindak lanjut untuk perbaikan ke depannya.



Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan daerah, sebagai berikut:

Tabel 13. Program dan Kegiatan Pendukung IKU 1

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan RKPD/Renja, dari Proses Musrenbang tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional. Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi ke Kabupaten, serta Peningkatan Konsistensi perencanaan Pembangunan Daerah.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi data dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian terhadap capaian target-target pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan dokumen tahunan dan lima tahunan
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

2. Meningkatnya Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Daerah

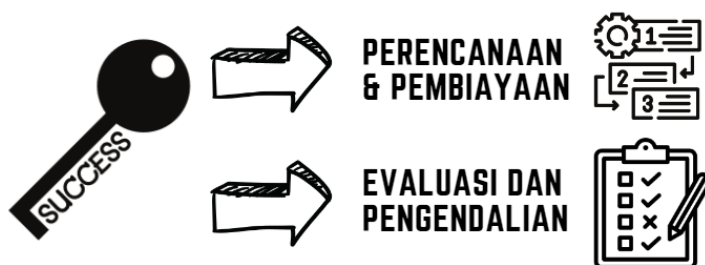
Bappeda sebagai Perangkat daerah yang bertugas sebagai Leading Sektor Perencanaan Dengan menerapkan Pendekatan perencanaan Money Follow Program dengan Konsep “THIS” | Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah perencanaan sekaligus Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan terhadap Perencanaan di wilayahnya. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan Prioritas pembangunan daerah sehingga target capaian kinerja pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata dapat tercapai. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Periodeisasi RPJMD 2021-2026. Tahun 2022 menjadi pijakan awal dalam rangka pencapaian kinerja pemerintah daerah, sehingga pencapaian kinerja tahun 2022 menjadi penting sebagai pemicu pencapaian di tahun-tahun berikutnya. Secara umum capaian indikator sasaran pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD dan RKPD tahun 2022 dapat tercapai, kondisi ini memberikan gambaran bahwa Bappeda Kutai Kartanegara sebagai leading sektor perencanaan pembangunan, telah berhasil dalam melakukan perencanaan dan mengawal pembangunan daerah.



Target		Realisasi 2022	% Capaian	
2022	2026 (Akhir Renstra)		2022	2026 (Akhir Renstra)
94.00	97.00	94.20	100.21	97.11

Pencapaian indikator sasaran strategis ini pada tahun 2022 telah melebihi target, dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (tahun 2026) persentase capaiannya juga cukup tinggi yaitu sebesar 97,11%. Pencapaian target ini merupakan keberhasilan dari seluruh perangkat Daerah dalam menerjemahkan target-target pembangunan yang di laksanakan melalui perencanaan tahunan sehingga tepat sasaran. Pencapaian ini akan terus dipertahankan oleh Bappeda kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun-tahun berikutnya, karena pencapaian indikator sasaran daerah merupakan dampak dari proses perencanaan pembangunan yang akan dirasakan oleh masyarakat Kutai Kartanegara sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun faktor pendukung Keberhasilan pencapaian target ini dilaksanakan melalui beberapa faktor-faktor sebagai berikut:



1. Perencanaan dan Pembiayaan

Seperti yang di jelaskan diatas perencanaan yang baik dan berkualitas dan didukung dengan pembiayaan yang tepat mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Bappeda sebagai think tank dan Leading dalam perencanaan dapat memberikan arahan perencanaan dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, sehingga seluruh perangkat daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian pembangunan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut dapat menyusun program-program lintas sektor dan lintas wilayah serta program strategis yang

merupakan isu daerah/regional dan nasional. Dalam pelaksanaannya Bappeda melalui fungsi pengendalian dan evaluasinya mengarahkan perangkat daerah dalam mewujudkan komitmen dan pengembangan potensi yang ada dalam mendukung arahan visi, misi serta tujuan yang ditetapkan melalui Renstra dan renja perangkat daerah masing-masing. Dengan demikian program-program yang dihasilkan dan dilaksanakan, dan dibiayai sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan serta dapat menjembatani penyusunan program satuan kerja lain dan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran akhirnya dapat dicapai.

2. Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintahan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Selain itu dilaksanakan juga pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan kemudian di input pada aplikasi e-pantau dan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda. Kemudian Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus secara aktif berperan dalam melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga menjadi salah satu faktor pendukung capaian Indikator kinerja sasaran strategis ini.

Adapun faktor penghambat capaian kinerja sasaran strategis ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kualitas Monitoring dan Evaluasi

Belum optimalnya proses monitoring dan pengendalian bidang-bidang perencanaan pembangunan cukup memberikan dampak pada pencapaian target indikator pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Masih belum optimalnya kualitas asistensi, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan bidang-bidang perencanaan di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara berdampak pada pencapaian target sasaran ini. Koordinasi dan Komunikasi dalam proses pengendalian pembangun yang dilakukan belum berjalan dengan optimal. Selain itu Tantangan yang menjadi Faktor penghambat berupa peraturan dan data yang belum terintegrasi, belum lengkap metadata dan standar data, serta dari aspek metodologinya. Strateginya adalah dengan bersinergi pada integrasi data, harmonisasi regulasi, kolaborasi dan sinkronisasi proses bisnis, serta penguatan kelembagaan.



Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Persentase Pencapaian Indikator Sasaran Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Tabel 14. Program dan Kegiatan Pendukung IKU 2

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Fasilitasi kegiatan koordinasi dan asistensi sub bidang perencanaan kepada seluruh OPD dibawah koordinasi masing-masing dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, Monitoring/Pengendalian serta evaluasi 2. Fasilitasi Kegiatan pendukung kebijakan Nasional dan Provinsi
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
			Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Fasilitasi kegiatan koordinasi dan asistensi sub bidang perencanaan kepada seluruh OPD dibawah koordinasi masing-masing dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, Monitoring/Pengendalian serta evaluasi 2. Fasilitasi Kegiatan pendukung kebijakan Nasional dan Provinsi
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Fasilitasi kegiatan koordinasi dan asistensi sub bidang perencanaan kepada seluruh OPD dibawah koordinasi masing-masing dalam rangka proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, Monitoring/Pengendalian serta evaluasi 2. Fasilitasi Kegiatan pendukung kebijakan Nasional dan Provinsi
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

3.3. Analisis Capaian Perjanjian Kinerja Tambahan

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara kepala Bappeda dengan Bupati Kutai Kartanegara, selain perjanjian kinerja yang ditetapkan berdasarkan dokumen rencana strategis, ada pula perjanjian kinerja tambahan yang harus dilaksanakan di semua perangkat daerah, Adapun analisis terhadap capaian perjanjian kinerja tersebut diuraikan dibawah ini.

Tabel 15. Capaian Kinerja Tambahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	100	100	100
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100
		Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2021	Persen	100	100	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	100	A(80,64)	80,64
2	Meningkatnya pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan fungsi perangkat daerah	Persentase keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	93,75	93,75
3	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100
4	Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang	Capaian output kegiatan	Persen	100	100	100

Analisis capaian kinerja tambahan pada tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda*

1.1 *Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti*

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah masing-masing dalam hal ini Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan diinstruksikan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada perangkat daerah terkait termasuk Bappeda. Di tahun 2022 atas rekomendasi dan instruksi tersebut Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak auditi telah merespon rekomendasi tersebut dalam bentuk tindak lanjut. Pada Tahun 2022 tindak lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI berupa upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong Kemudahan Berusaha melalui Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2022 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal tindak lanjut rekomendasi dan instruksi ini, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan/membuat kajian terhadap perencanaan kebijakan infrastruktur terkait

penanaman modal yaitu dengan Rencana Aksi Menyusun Kajian Perencanaan Kebijakan Infrastruktur terkait penanaman modal berdasarkan RUMPK.

1.2. Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

Aset/barang milik daerah merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat/stakeholder. Namun disisi lain, walaupun memegang peranan penting, seringkali aset belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Selaras dengan hal tersebut di tahun 2022 Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), mulai dari identifikasi, penelusuran, sampai dengan rencana penghapusan BMD yang masuk dalam kategori rusak berat. Identifikasi aset-aset daerah yang telah dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mutakhir mengenai aset daerah yang dimiliki di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang baik. Selain itu pada tahun 2022 dilakukan juga penghapusan dengan proses pemusnahan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat.

1.3. Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi atas kebijakan pengadaan barang/jasa (PBJ), khususnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang lebih cepat, pasti, transparan dan akuntabel, maka Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan proses tersebut dengan input seluruh rencana umum pengadaan pada Aplikasi SiRUP. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen dalam pelaksanaan Keseluruhan tahapan PBJ yang dimulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaannya, dengan harapan PBJ yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi semakin mendorong terwujudnya value for money atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa. Dari total jumlah rencana pengadaan yang harus di input / ditayangkan pada aplikasi telah di input pada aplikasi SiRUP sebelum batas akhir penginputan yang telah di tetapkan.

1.4. Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

Sebagai salah satu prasyarat guna mencapai perangkat daerah yang sehat akuntabel serta bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara menyadari pentingnya penerapan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan Perangkat Daerah sebagai acuan bagi Pejabat Struktural dan seluruh ASN untuk menciptakan dan mengembangkan Budaya perangkat Daerah yang baik. Kepatuhan terhadap pelaporan bertujuan untuk mengurangi terjadinya peningkatan kekayaan pejabat perusahaan yang diperoleh dari tindakan korupsi, suap, kecurangan dan tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan. Dalam proses pengendalian internal, implementasi pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan ASNI(LHKPN & LHKASN) tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan bagi perangkat daerah dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari total pejabat struktural/Pejabat Fungsional Perencana sebanyak 21 orang dan seluruh ASN non struktural/ Jabatan Pelaksana sebanyak 113 orang telah secara tepat waktu melaporkan harta kekayaannya pada aplikasi LHKPN dan LHKASN.

1.5. Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari penerapan Peraturan Menpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa kualitas pengelolaan arsip menjadi indikator penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah. Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan akan menghadirkan manfaat yang besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik dan terpercaya pada setiap Lembaga dan Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Kutai kartanegara telah melaksanakan perbaikan pengelolaan arsip mulai dari Pemilahan, Pengelompokkan, Pembuatan Daftar Arsip, Pembungkusan dan Penomoran Arsip, Penataan arsip dalam Boks, Pelabelan dan Penataan Boks dalam Roll Opack/Rak serta sampai pembangunan record center yang berguna untuk menyimpan dan mengakses arsip dengan cepat dan efisien serta akuntabel. Berkaitan

dengan pengelolaan arsip Bappeda Kutai Kartanegara selama 2 Tahun berturut-turut (2021-2022) menjadi perangkat daerah terbaik dalam pengelolaan arsip.

2. Meningkatnya pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan fungsi perangkat daerah dengan indikator:

- Persentase keterisian data di Aplikasi Satu Data Kukar:

Dalam rangka mendukung Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dalam menuju Satu Data Indonesia (SDI)/satu data Kutai Kartanegara melalui kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dan instansi Daerah, maka pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara telah membangun sebuah system aplikasi Satu Data Kukar yang dinamakan Bersama Etam Ciptakan Informasi Kolaboratif (BECIK). Berkaitan hal tersebut maka ketersediaan data di sediakan oleh produsen data dalam hal ini perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta keterkaitan data sectoral. Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini telah melaksanakan pengeleloan data tersebut melalui penyediaan data yang terinput pada aplikasi BECIK sesuai dengan jenjang structural yang menjadi tugas dan fungsi. Keterisian data pada Aplikasi Becik sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 telah terisi 100% , yang diinputkan berdasarkan periodeisasi data masing-masing (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).

3. Membuat inovasi dan atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah dengan indikator:

- Jumlah Inovasi terkait penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka Amanah Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstreem dengan target penurunan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 melalui pemanfaatan data P3KE sebagai acuan pensasaran program dan DTKS. Pelaksanaan pengurangan kemiskinan dilaksanakan melalui dua kelompok besar program yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin, dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Tantangan terbesar dari pelaksanaan tersebut adalah, bagaimana membuat program-program dapat dilaksanakan dengan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama. Hal ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat

perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak. Memperhatikan hal tersebut dalam rangka mendukung program dedikasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka Bappeda membangun sebuah system yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yaitu “Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan” (RBPK), <https://rbpk.kukarkab.go.id/>. RBPK merupakan salah satu program dedikasi KUKAR IDAMAN 2021-2026, yakni simpul kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan terintegrasi, terarah, terdokumentasi, transparan dan bertanggung jawab berbasis data yang valid dan actual. Manfaat dari RBPK ini adalah sebagai:

1. Alat bantu penyusunan program intervensi dalam perspektif satu data;
2. Intergrasi dan Kolaborasi pembiayaan pemerintah dan non pemerintah;
3. Pengawasan akurasi data sasaran penerima manfaat program;
4. Alat pengendalian evaluasi dan pelaporan.

4. Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan indikator:

- Capaian output kegiatan tanpa hutang.

Pada tahun 2022 Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 34,618,108,652 dengan pelaksanaan 3 Program, 14 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan dalam rangka mencapai 2 Indikator Sasaran Utama. Pada tahun 2022 realisasi anggaran sebesar Rp. 29,391,201,213 (84.90%) dengan rata-rata capaian fisik 84.90 tanpa menimbulkan potensi hutang pada masing-masing pelaksanaan sub kegiatan pendukung program dan kegiatan yang dimaksud. Kondisi ini merupakan gambaran dari optimalnya pelaksanaan pengendalian internal dari seluruh elemen Pimpinan dan seluruh ASN di Bappeda. Pengendalian internal ini dilakukan mulai dari proses administrasi , teknis sampai pada keuangan.

3.4. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap penggunaan sumber daya baik berupa Sumber Daya Manusia, waktu, rentang kendali (birokrasi), Proses Pelaksanaan maupun anggaran tanpa mengurangi hasil melainkan untuk meningkatkan capaian kinerja. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien serta menjadikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain dilakukan dengan:

1. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

penerapan teknologi informasi dan komunikasi memang mutlak dalam institusi pemerintah sebagai alat bantu dalam meningkatkan produktivitas dan kemudahan dalam bekerja. Sebagai institusi perencanaan, Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, melalui pemanfaatan aplikasi dalam memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan seperti Aplikasi Geoportal, Aplikasi Becik serta penggunaan aplikasi e-pantau dan Aplikasi RBPK dalam rangka proses perencanaan dan memudahkan proses monitoring dan pengendalian yang digunakan sebagai bahan evaluasi perencanaan kedepan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh pada produktifitas dan capaian kinerja Bappeda, dimana rata-rata target indikator sasaran dapat tercapai.

2. Penggunaan Anggaran

Proses penerapan SAKIP di Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan organisasi yang merujuk pada anggaran berbasis kinerja. Penghematan anggaran terjadi dengan memperhatikan kegiatan yang mendukung prioritas Daerah dan Nasional, mendukung pada pencapaian target-target Makro daerah dan kegiatan yang memfasilitasipencapaian sasaran-sasaran pada perangkat daerah. Efisiensi bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja berbasis “target oriented”. Adapun gambaran mengenai efisiensi penggunaan anggaran terhadap kinerja pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 16. Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Keuangan	Rata-Rata Capaian IKU Tahun 2022	Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian	Score Penilaian Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	34,618,108,652.00	29,391,201,213.00	84.90	88.37	3.46

No	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Keuangan	Rata-Rata Capaian IKU Tahun 2022	Efisiensi
	Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian Indikator Sasaran Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota					

Berdasarkan tabel diatas implementasi SAKIP pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik mengarahkan organisasi beserta pelaku di dalam untuk menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan pada prioritas dan kebutuhan pencapaian sasaran perangkat daerah. Implementasi SAKIP pada Bappeda telah mendorong terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja.

3.5. Realisasi Program, Kegiatan & Anggaran

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2022 pelaksanaan program Kegiatan serta sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pagu belanja langsung termasuk dengan belanja Generik Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 (Perubahan APBD) adalah sebesar **Rp 34,618,108,652.00** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar **Rp. 29,391,201,213.00** atau sebesar **84.90 %**. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Capaian efektifitas Kinerja

No	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Keuangan	Efisiensi
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87.00	25,980,459,212		22,421,981,559		86.30	13.70
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		445,233,763		392,428,278		88.14	11.86
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	314,282,730	7	285,063,738	100	90.70	9.30
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	24,200,000	4	22,639,800	100	93.55	6.45
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	2	22,270,000	2	15,655,000	100	70.30	29.70
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	84,481,033	1	69,069,740	100	81.76	18.24
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		16,570,844,224		13,398,918,028		80.86	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1668	16,339,890,424	1668	13,187,977,923	100	80.71	19.29
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	220,273,800	5	201,820,105	100	91.62	8.38
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	10,680,000	1	9,120,000	100	85.39	14.61
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		131,318,000		100,910,000		76.84	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan BMD pada SKPD yang di lakukan penatausahaan	3	131,318,000	3	100,910,000	100	76.84	23.16
I.4	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		655,560,000		597,322,790		91.12	
			Jumlah Pakaian							
			Jumlah ASN							
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	147	239,560,000	139	234,313,000	94.56	97.81	2.19

No	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Keuangan	Efisiensi
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	50,000,000	4	28,715,000	100	57.43	42.57
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	366,000,000	30	334,294,790	75.00	91.34	8.66
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,859,683,000		1,781,494,256		95.80	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	219,126,000	15	212,140,000	100	96.81	3.19
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan	7	459,558,000	7	433,772,000	100	94.39	5.61
			Jumlah kotak makanan dan minuman rapat yang disediakan	5381		5281		98.14		
			Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan	7		7		100		
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah cetakan	1061	55,646,000	1061	44,610,000	100	80.17	19.83
			Jumlah Cetakan Kalender	175		175		100		
			Jumlah penggandaan	20062		20062		100		
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bacaan yang disediakan	9	322,409,000	9	316,050,567	100	98.03	1.97
			Jumlah kontrak advetorial	25		25		100		
5	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	14	129,264,000	14	119,519,870	100	92.46	7.54
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	146	490,000,000	225	481,438,007	100	98.25	1.75
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)	65	80,010,000	65	78,253,812	100	97.81	2.19
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1	103,670,000	1	95,710,000	100	92.32	7.68
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		1,591,263,036		1,567,535,036		98.51	
1	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Mebeleur yang diadakan	27	200,000,000	27	193,175,689	100	96.59	3.41
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peralatan gedung kantor	18	1,391,263,036	18	1,374,359,347	100	98.79	1.21

No	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Keuangan	Efisiensi
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			
I.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		2,324,251,968		2,278,708,220		98.04	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	1,595,023,920	12	1,578,221,192	100	98.95	1.05
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS	12	729,228,048	12	700,487,028	100	96.06	3.94
			Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12		12		100		
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah		2,402,305,221		2,304,664,951		95.94	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	15	313,830,000	15	267,938,621	100	85.38	14.62
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	6		6		100		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	25	209,660,000	25	186,881,390	100	89.14	10.86
			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	3		3		100		
3	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	38	1,086,044,721	38	1,071,759,940	100	98.68	1.32
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	132	792,770,500	132	778,085,000	100	98.15	1.85
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	4,817,400,000	93.29	4,054,982,411	93.29	84.17	
II.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan pendanaan		2,480,000,000		2,289,524,247		92.32	
			Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat/Lintas Perangkat Daerah							
			Jumlah Pendampingan perencanaan							

No	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Keuangan	Efisiensi
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1	300,000,000	1	231,174,700	100	77.06	22.94
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Integrasi TJSP	1	1,055,000,000	1	1,013,691,642	100	96.08	3.92
			Jumlah Dokumen penyusunan strategi Kukar sebagai Daerah Mitra IKN	1		1		100		
			Jumlah Pendampingan Perencanaan	58		58		100		
			Jumlah Dokumen proses Bisnis RPJMD	1		1		100		
3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	90,000,000	1	76,840,000	100	85.38	14.62
4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3	33,620,000	3	30,158,000	100	89.70	10.30
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pelaksanaan musrenbang	1	57,599,000	1	44,090,000	100	76.55	23.45
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan	18	73,309,000	18	73,243,000	100	99.91	0.09
7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RKPD dan Perubahan RKPD)	2	870,472,000	2	820,326,905	100	94.24	5.76
II.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		1,034,900,000		759,319,297		73.37	
			Jumlah rancangan Regulasi Daerah							
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Analisis Data Kemiskinan	1	402,500,000	1	340,601,601	100	84.62	15.38
			Jumlah dokumen (data bidang perencanaan)	3		3		100		
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah pendampingan ketersediaan data (32 urusan)	32	530,000,000	32	344,947,696	100	65.08	34.92
			Jumlah Personil Pembinaan Data	30		30		100		

No	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Keuangan	Efisiensi
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			
			Jumlah Layanan Data dan Informasi Kecamatan	1		1		100		
			Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	1		1		100		
3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	102,400,000	1	73,770,000	100	72.04	27.96
II.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		1,302,500,000		1,006,138,867		77.25	
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	8	602,500,000	8	517,301,804	100	85.86	14.14
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4	700,000,000	4	488,837,063	100	69.83	30.17
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	3,820,249,440	94.96	2,914,237,243	94.96	76.28	
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100		90,02		90,02		
			Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100		99,05		99,05		
III.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1,360,250,000		1,145,059,972		84.18	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11	115,000,000	11	71,485,683	100	62.16	37.84
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	100,000,000	11	95,592,991	100	95.59	4.41
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1		1		100		

No	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Keuangan	Efisiensi
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11	70,000,000	11	62,324,300	100	89.03	10.97
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1	198,500,000	1	179,961,516	100	90.66	9.34
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	236,750,000	12	186,157,876	100	78.63	21.37
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	100,000,000	12	99,198,976	100	99.20	0.80
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1		1		100		
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12	115,000,000	12	46,631,000	100	40.55	59.45
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1	425,000,000	1	403,707,630	100	94.99	5.01
			Jumlah Dokumen Pendukung Kebijakan Kemiskinan	2		2		100		
III.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		1,180,000,000		656,311,810		55.62	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	67,500,000	6	31,632,000	100	46.86	53.14
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	100,000,000	6	70,787,000	100	70.79	29.21

No	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Keuangan	Efisiensi
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1		0		0		
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6	200,000,000	0	19,629,000	0	9.81	90.19
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	33,750,000	1	30,369,687	100	89.98	10.02
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	90,000,000	5	81,566,532	100	90.63	9.37
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	100,000,000	5	18,333,914	100	18.33	81.67
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1		0		0		
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	255,000,000	5	124,534,142	100	48.84	51.16
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2	333,750,000	2	279,459,535	100	83.73	16.27
III.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		1,279,999,440		1,112,865,461		86.94	
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	45,000,000	4	41,549,520	100	92.33	7.67
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	11,182,000	4	8,120,000	100	72.62	27.38

No	Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Target		Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Realisasi Keuangan	Efisiensi
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan			
			Jumlah MOU dengan perguruan tinggi	1		0		0		
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	235,749,620	4	177,415,848	100	75.26	24.74
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3	248,068,000	3	236,860,000	100	95.48	4.52
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18	45,000,000	18	41,339,936	100	91.87	8.13
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	100,000,000	18	69,687,257	100	69.69	30.31
			Jumlah Mou dengan perguruan tinggi	1		0		0		
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	18	249,999,820	18	198,434,385	100	79.37	20.63
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2	345,000,000	2	339,458,515	100	98.39	1.61
TOTAL					34,618,108,652		29,391,201,213		84.90	5.10
Rata-rata Kinerja Program								95.99	82.25	17.75
Rata-rata Kinerja Sub Kegiatan								93.74	82.71	17.29

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian program untuk tahun 2022 adalah 95,99 dengan rata-rata capaian sub kegiatan 93,74, capaian ini cukup baik mengingat tahun 2022 merupakan tahun awal perencanaan. Pencapaian ini juga berbanding lurus dengan adanya efisiensi dalam hal penyerapan anggaran dengan realisasi keuangan sebesar 82,85 dengan efisiensi sebesar 17,75 pada Program dan 82,71 dengan efisiensi sebesar 17,29 pada Sub Kegiatan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terus mengalami peningkatan, begitu pula manajemen kinerja yang berbasis hasil terus di internalisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada laporan Kinerja tahun 2022 ini, tidak ditampilkan capaian tahun sebelumnya mengingat tahun 2022 merupakan tahun awal dan penggunaan program yang berbeda yang menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan. Analisis capaian kinerja Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung urusan perencanaan dalam kurun waktu tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini di tahun 2022 secara target telah tercapai dengan cukup baik dengan Persentase realisasi sebesar 93.29. Tahun 2022 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD dan Renstra periodeisasi tahun 2021-2026, dan merupakan pijakan awal dalam rangka pencapaian perencanaan 5 tahunan kedepan. Pencapaian program ini merupakan gambaran dari Bappeda sebagai leading sector dalam merencanakan dan mengendalikan program dan kegiatan prioritas di perangkat daerah dalam rangka mendukung capaian sasaran daerah, sehingga pencapaian target-target sasaran daerah dapat tercapai dengan cukup baik pula. Bappeda telah berhasil melakukan perencanaan dan pengendalian yang dilakukan dengan melaksanakan penyiapan data, analisis, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pengembangan dan perencanaan teknis bidang pembangunan daerah. Selain itu Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terus memperkuat sistem informasi dalam rangka kemudahan ,

peningkatan akuntabilitas serta alat dalam perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan melalui inovasi-inovasi sistem yang dibuat.

2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rata-Rata capaian dari ketiga indikator program ini adalah sebesar 94,68 yang menggambarkan bahwa capaian kinerja sudah cukup tinggi. Program ini terkait dengan program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dimana program ini menggambarkan bahwa antara kedua program ini merupakan lingkaran/siklus kinerja yang tidak terputus. Indikator dari program ini adalah mengukur rata-rata capaian indikator program dari seluruh perangkat daerah dibawah koordinasi bidang perencanaan yaitu Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan serta Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah atas pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang di masing-masing bidang perencanaan. Hasil pengendalian yang telah dilaksanakan oleh bidang perencanaan yang kemudian di evaluasi, akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk input perencanaan pada periode berikutnya. Pelaksanaan rekomendasi yang tertuang dalam Renja masing-masing perangkat daerah tergambar dari capaian masing-masing indikator pada perangkat daerah tersebut.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

Tolok ukur capaian Program ini diukur dengan indikator **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** yang dinilai dari hasil Laporan Hasil Evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah oleh inspektorat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program ini merupakan pendukung / supporting bagi kedua program lainnya yang ada untuk mencapai kinerja program itu sendiri dan indikator kinerja utama dari perangkat daerah.

Sesuai dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2022 yang merupakan penilaian capaian akuntabilitas tahun 2021. Capaian kinerja akuntabilitas Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat dengan skor sebesar 93,63 di tahun 2021, meningkat 8,42 poin dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dengan skor sebesar 85,21. Dengan skor tersebut maka peringkat penilaian akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam predikat “AA”.

Capaian yang diraih Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara adalah proses perbaikan yang terus menerus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja yang merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Kualitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan pendekatan melalui perbaikan standar belanja berbasis program yang berprinsip pada efisiensi, bukan pada serapan anggaran. Selain itu dengan perbaikan-perbaikan dalam kualitas perencanaan yang merupakan bagian “hulu” dalam proses SAKIP terus di perkuat dengan fokus pada perbaikan dan penguatan penyusunan indikator dan target kinerja hal ini diimplementasikan dalam bentuk keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja. Selain hal prinsip yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerja, Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara juga terus berupaya untuk melakukan inovasi dalam penerapan manajemen kinerja internal, agar mampu mengukur ketercapaian tujuan organisasi

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dan kinerja sasaran, dimana juga disajikan analisis atas kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran dan analisa atas capaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2022 dari 2 IKU yang telah diperjanjikan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026, 2 IKU telah berhasil dengan persentase realisasi capaian IKU 1 sebesar 94,09 dan IKU 2 sebesar 100,21.

Rata-rata Capaian program tercapai 95,99 % dan rata-rata capaian Sub kegiatan 93,74, keberhasilan pencapaian target ini menggambarkan bahwa Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya meningkatkan kualitas capaian kinerja dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, kedepan peningkatan kinerja akan terus dilakukan dan menjadi kewajiban seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertahankannya dalam rangka menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah dapat terwujud.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2022 ini dibuat dan disajikan. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kutai kartanegara sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Daerah.

Tenggarong, 22 Februari 2023

Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
Plt. Kepala



Sy. Vanesa Vilna SIS, SE., MM
NIP. 19740217 199703 2 004



BAPPEDA.KUKARKAB.GO.ID



BAPPEDA.KUTAIKARTANEGARA



BAPPEDA KUTAI KARTANEGARA



BAPPEDA KUTAI KARTANEGARA